

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Berdasarkan dengan judul Skripsi oleh penyusun mengenai “**Konflik Perebutan Kharisma dalam Kemursyidan Syekh Muhammad Abdul Gaos Sebagai Mursyid ke 38 Thoriqoh Qodiriyah Naqsabandiyah Suryalaya (Studi Kasus Konflik Kelompok 37 dan Kelompok 38 TQN PP-Suryalaya dan Ma’had Suryalaya di Kecamatan Dayeuhluhur)**”, maka diperlukan penjelasan mengenai teori konflik, Kekuasaan Kharismatik dan Teori Elit. Maka dari itu penyusun akan menguraikan beberapa landasan teoritis yang akan dijadikan pijakan untuk penelitian ini, diantaranya:

1. Teori Konflik Ibnu Khaldun

Webster dalam Tajuddin (2016: 84), mendefinisikan bahwa konflik itu berasal dari istilah “*Conflict*” yang artinya perkelahian, pertentangan, peperangan yang mana lebih kepada kontak fisik. Kemudian istilah ini berkembang menjadi ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Sehingga dalam pengertian luas tidak mengacu pada fisik saja melainkan yang berkenaan dengan aspek psikologis. Kemudian konflik menjadi yang mempunyai arti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat secara simultan. Dari sisi psikologis pada perbedaan kepentingan yang terjadi

dan memberikan tekanan pada konflik sebagaimana hal itu terjadi saat ini beserta implikasi yang mungkin menyertai masa mendatang. Konflik juga bisa terjadi pada berbagai macam keadaan dan berbagai tingkat kompleksitas.

Ibnu Khaldun dalam Affandi (2004: 72) menjelaskan bahwa konflik dilihat dengan dua hal, *pertama*, mengkonseptualisasikan persoalan konflik yang selalu terjadi dalam sejarah peradaban manusia terutama dalam realitas masyarakatnya yang diwarnai peperangan, perebutan kekuasaan dan disintegrasi. *Kedua*, menemukan formula bagi pembangunan kembali kejayaan bangsa dan agamanya. Ibnu Khaldun memandang bahwa konflik bukan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan lahir dari interaksi antarindividu maupun kelompok dalam berbagai bentuk aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budayanya. Dalam rentetan sejarah konflik dalam islam Affandi (2004: 52), menjelaskan bahwa kesatuan umat muslim mulai goyah dan mulai adanya tanda-tanda disintegrasi terutama menjelang berakhirnya dekade kedua masa Khulafaur Rasyidin yaitu diakhir pemerintahan Utsman Ibn Affan. Terbunuhnya Khalifah Utsman benar-benar mendorong lahirnya banyak sekte dalam Islam dengan doktrin yang berbeda-beda. Kemudian diperparah dengan adanya peristiwa perang Shiffin antara umat muslim fraksi Sayyidina Ali dan umat muslim fraksi Mu'awiyah yang kemudian membentuk kelompok Sunni dan Syi'ah yang merupakan salah satu buah dari konflik sosial-politik umat muslim pada saat itu.

Affandi (2004: 79) menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun dengan pengalaman empiriknya mengetahui perbedaan-perbedaan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat baik masyarakat nomaden atau menetap dan hubungan antar

keduanya. Ibnu Khaldun melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kelompok-kelompok dan individu dari ras yang sama, mempraktikkan agama yang sama tetapi menampilkan sudut pandang kehidupan sosial yang sangat berbeda. Ibnu Khaldun tidak hanya mengetahui tetapi juga mengalami perbedaan-perbedaan tersebut. Ketika menulis *Muqqadimah* ia telah melakukan perjalanan Panjang di dua Ibu Kota umat Islam Maghrib yaitu Tunis dan Fez. Ibnu Khaldun telah mengenal Andalusia karena bekerja pada Sultan Granada. Selain itu juga Ibnu Khaldun pernah hidup ditengah suku-suku nomaden Arab, Banu Hilal. Ibnu Khaldun dalam Affandi (2004: 80) menambahkan bahwa konflik menurut perspektif Ibnu Khaldun ada tiga pilar utama, yakni: *Pertama*, watak psikologis yang merupakan dasar sentiment dan ide membangun hubungan sosial diantara berbagai kelompok manusia (keluarga, suku, dan lainnya), *kedua*, fenomena politik yaitu berhubungan dengan perjuangan memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti, dan negara, *ketiga*, fenomena ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Berikut penjelasan ketiga pilar utama dalam perspektif Ibnu Khaldun dalam melihat Konflik

a. Watak Psikologis Manusia

Manusia memiliki tiga potensi dalam dirinya yaitu intelligibilia, sensibilia dan spiritualia. Ketiga potensi ini bila dikembangkan dengan baik maka manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah dimuka bumi. Namun ada potensi lain yang bisa mendorongnya bertindak agresif. Potensi tersebut

muncul karena adanya pengaruh *animal power* dalam dirinya. Karena potensi inilah, manusia dikenal sebagai *rational animal* atau *animale rationale* atau *hayawaanun natiqun*. Dalam hubungannya dengan konflik ada dua potensi dalam diri manusia yang menjadi perhatian Ibnu Khaldun yakni Cinta terhadap (identitas) kelompok dan agresif

1) Cinta terhadap (identitas) kelompok

Menurut Ibn Khaldun dalam Affandi (2004: 82) menjelaskan bahwa manusia secara fitrah telah dianugerahi rasa cinta terhadap garis keturunan dan golongannya. Rasa cinta menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta harga diri kelompok, kesetiaan, kerja sama, dan saling membantu dalam menghadapi musibah atau ancaman yang pada akhirnya akan membentuk kesatuan dan persatuan kelompok. Dalam terminology Ibnu Khaldun, hal ini disebutkan *Ashobiyah* (ikatan sosial).

2) Agresif

Affandi (2004: 83), menjelaskan bahwa manusia memiliki watak agresif sebagai akibat adanya *animal power* dalam dirinya yang mendorong untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan. Agresifitas manusia ini bisa menjadi pemicu utama konflik antarmereka yang berakibat terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah. Menurut Ibnu Khaldun yang membedakan manusia dan hewan adalah akal atau pikiran.

b. Fenomena Politik

Affandi (2004: 86), menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun dikenal pula sebagai ilmuwan politik. Dalam bidang politik, Ibnu Khaldun bukanlah ilmuwan yang hanya menghabiskan banyak waktu dibelakan meja untuk menulis atau melakukan penelitian terhadap berbagai fenomena politik. Tetapi selama bertahun-tahun Ibnu Khaldun terlibat langsung dalam berbagai intrik politik, perebutan kekuasaan dan mendirikan kekuasaan baru diatas kekuasaan lama. Disamping itu Ibnu Khaldun menyaksikan berbagai fenomena politik diberbagai wilayah yang membentang di Afrika dan Spanyol. Berbagai jabatan penting yang pernah dijabat oleh Ibnu Khaldun selama hidupnya sehingga ia menjadi orang kepercayaan di kesultanan-kesultanan kala itu. Dari pengalamannya ini Ibnu Khaldun telah menemukan suatu formula mengenai masyarakat dan teorinya mengenai *Ashobiyah* sebagai pendorong roda kehidupan sosial masyarakat.

1) Akar berdirinya Negara

Ibnu Khaldun dalma Affandi (2004: 29) menambahkan bahwa manusia untuk bisa bertahan hidup harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu diperlukan kerja sama antar sesama manusia yang kemudian membentuk kelompok masyarakat. Dari sinilah menurut Ibnu Khaldun menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (*al-ijtima' al insani*) adalah merupakan suatu keharusan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa masyarakat berkembang dalam dua bentuk yaitu *pertama*, masyarakat

pengembara (nomaden) dan masyarakat menetap (sedentary society). *Nomaden society* dipadang pasir hidup dari pertanian dan memelihara hewan ternak. Masyarakat nomaden society ditandai oleh ikatan darah dan agama. Wataknya keras dan tegas, fisiknya kuat dan suka bekerja keras. Masyarakat ini diikat dengan *ashobiyah* yang kuat. Mereka merasa sederajat dan terdapat persamaan hak termasuk dalam bagian sumber-sumber penghidupan. Mereka juga cinta kebebasan, berani, percaya diri, dan sederhana. Sedangkan masyarakat menetap adalah penduduk yang sudah tinggal Bersama di suatu kota/al-madinah dan merupakan perkembangan dari masyarakat pengembara. *Sedentary society* ditandai oleh masyarakat oleh masyarakat yang lebih malas, dan suka yang praktis, tetapi lebih berpengalaman dan pintar. Selain itu mereka masih bergantung pada kekuasaan politik seperti gubernur dan raja serta para tentara. Ibnu Khaldun menuturkan bahwa perkembangan masyarakat ini melahirkan pandangan yang cemerlang mengenai negara. Masyarakat yang mempunyai pemimpin disertai kekuasaan tadi, itulah yang disebut negara.

2) Kekuasaan Raja atau Kepala Negara

Kemudian Ibnu Khaldun dalam Affandi (2004: 9) menambahkan bahwa kehadiran kepala negara sebagai penengah, pemisah, dan sekaligus pemegang otoritas itu merupakan suatu keharusan bagi kehidupan Bersama dalam suatu masyarakat atau negara. Di dalam suatu organisasi kemasyarakatan akan terjadi hubungan atau interaksi

antarsesama anggotanya. Dari sinilah akan banyak menimbulkan berbagai persoalan yang salah satunya adalah konflik. Mengingat watak agresif atau *animal power* dampaknya pada pertikaian yang menimbulkan permusuhan yang kemudian menimbulkan kekacauan, pertumpahan darah yang pada gilirannya bisa menjadi peperangan yang dapat memusnahkan umat manusia itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini anarki yang menjadi penghambat kemajuan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu diperlukan seseorang yang dapat menjadi pengendali dan mampu memerintah seseorang itu adalah raja atau kepala negara.

c. Fenomena Ekonomi

Ibnu khaldun termasuk salah satu teoritikus konflik yang tidak melihat faktor ekonomi lebih dominan dibandingkan faktor lain sebagai penyebab konflik. Bahwa konflik seringkali muncul karena adanya motivasi ekonomi seperti disebut dalam *muqaddimah*, tetapi keberadaanya tidak lebih dominan disbanding yang lain. Bahkan, dalam penjelasannya beberapa peristiwa konflik, terlihat perhatiannya yang lebih ditujukan pada penjelasan faktor sosial-politik. Ibnu khaldun dalam affandi (2004: 101), menjelaskan bahwa perkembangan dan perbedaan antargenerasi sangat terkait erat dengan perbedaan pada pola perekonomian atau mata pencaharian yang mereka lakukan.

Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi bahkan menentukan situasi dan perkembangan politik. Ibnu khaldun dalam Affandi (2004: 103),

mengemukakan bahwa neraca keuangan yang seimbang bagi suatu Negara adalah faktor penting dalam mencapai kestabilan politik. Dalam hubungannya dengan perubahan politik, Ibnu khaldun menjelaskan bahwa perekonomian yang dijalankan di bawah kekuasaan politik yang korup akan mengakibatkan hancurnya *'ashobiyah* yang mengantarkan seorang penguasa ke puncak kekuasaan Negara. Kemudian Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana kolaborasi antara penguasa politik dengan penguasa ekonomi terjadi. Menurutnya, seseorang yang memiliki banyak modal dan menguasai perekonomian akan membutuhkan proteksi atau perlindungan serta wibawa dari pemegang kekuasaan (politik).

d. *Ashobiyah* sebagai poros

Ibnu Khaldun dalam Affandi (2004: 105) menjelaskan bahwa konsep *'ashobiyah* merupakan poros utama dalam teori-teori sosial Ibnu Khaldun dalam salah satu karyanya di dalam kitab *Muqaddimah*. Secara etimologi *'ashobiyah* dapat diartikan sebagai kedekatan hubungan seseorang dengan golongan atau kelompoknya dan berusaha sekuat tenaga untuk memegang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Beragam istilah dalam menggunakan istilah *ashobiyah* yang digunakan oleh para ilmuwan yang secara khusus mempelajari *muqaddimah*. Frans Rosenthal menyebut *ashobiyah* sebagai *group feeling*. Munawir sadjali menyebutnya sebagai solidaritas sosial. Osman Raliby menyamakan *ashobiyah* dengan nasionalisme. Muhsin Mahdi mengartikannya sebagai solidaritas sosial. Charles Issawi

membahasakannya *solidarity*. Philip K. Haiti mengartikannya *tribal spirit* atau *the spirit of clan*. F. Gabrieli menerjemahkannya dengan *spirit di carpo* atau *sprito di parte*. T. Kemiri menerangkannya bahwa *ashobiyah* itu adalah “nasionalisme dalam arti yang lebih luas”. Sedangkan A. Mukti Ali mengartikannya dengan solidaritas sosial.

Affandi (2004: 108) menjelaskan dalam *muqaddimah* disebutkan bahwa kemurnian ikatan darah hanya dimungkinkan terjaga dalam masyarakat terisolir, seperti masyarakat pengembara di gurun pasir. Sedangkan dalam masyarakat menetap kemurnian tersebut tidak dapat terjaga karena interaksi dengan suku lain dan menyebabkan percampuran garis keturunan. Dilihat dari historisnya, istilah '*ashobiyah* digunakan oleh kalangan bangsa Arab untuk menunjukkan hubungan kekeluargaan atau hubungan yang didasarkan oleh ikatan darah. Ibnu Khaldun dalam Affandi (2004: 109), menyebutkan bahwa menggunakan istilah ini dengan maksud untuk menunjukkan semangat yang terdapat dalam ikatan tersebut, yaitu rasa cinta, rasa sepenanggungan dan rasa senasib. Seseorang tidak akan rela bila salah satu anggota dari '*ashobiyah*-nya terhinakan dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan kelompok mereka yang bahkan sampai pada pengorbanan nyawa. Semangat seperti ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat nomad padang pasir yang memiliki ikatan darah atau keluarga, tetapi juga terjadi dalam

masyarakat yang sudah menetap yang hubungannya didasarkan atas kepentingan yang bersifat imajiner.

Zainudin dalam Affandi (2004: 109) menyebutkan bahwa '*Ashobiyah* diperlukan untuk mensukseskan setiap usaha yang melibatkan banyak orang. Perjuangan politik memerlukan '*ashobiyah*, bahkan agama dan hukum agama yang diturunkan Allah pun memerlukan '*ashobiyah* untuk mensukseskannya. Kemudian Ibnu Khaldun dalam Affandi (2004: 109), menyatakan bahwa:

“ketahuilah bahwa kedudukan raja adalah akhir yang wajar dari perkembangan yang lanjut dari solidaritas sosial....sebab tidak ada hukum, agama, atau suatu lembaga bisa berjalan dengan tidak adanya golongan yang bersatu yang memaksakan dan menetapkan semua itu untuk dilaksanakan dan dengan tidak adanya solidaritas segalanya tidak dapat ditegakkan. Karena itu solidaritas sosial tidak boleh tidak mestilah ada, suatu bangsa mesti memainkan peranan yang telah dipikirkan oleh Allah untuknya.”

Menurut Mummud Tahir Azhari dalam affandi (2004: 112) menyebutkan bahwa bisa jadi kekuatan destruktif maupun konstruktif. '*Ashobiyah* menjadi destruktif apabila digunakan dengan tujuan menghancurkan dan meruntuhkan peradaban misalnya digunakan untuk menjatuhkan pemerintah atau penguasa bisanya terdapat dalam masyarakat system politik sosial alamiah atau kesukuan ataupun modern. '*Ashobiyah* dapat menjadi kekuatan konstruktif apabila digunakan dengan tujuan baik dan membangun peradaban misalnya mengawasi dan mengontrol sekaligus mendorong pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian Ibnu Khaldun menyimpulkan seperti yang tertulis dan

ditemukan *al-ibar* Konflik itu akan selamanya ada dalam masyarakat karena akar dalam diri manusia karena adanya *animal power* dalam diri manusia yang mendorong untuk bertindak agresif dan juga pengaruh dari kondisi eksternal, baik politik maupun ekonomi. Namun demikian konflik tidak selalu bersifat destruktif, sama seperti yang disampaikan oleh Lewis Cosser. Manusia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah jika selalu diwarnai oleh tindakan anarkis dan destruktif.

'Ashobiyah yang terdapat ikhwan TQN Suryalaya sangatlah erat baik dari kelompok 37 maupun kelompok 38. Keduanya diikatkan oleh *bai'at* atau *Talqin* yang dampaknya menjadi suatu kelompok yang memiliki rasa persaudaraan, rasa cinta terhadap sang *Mursyid*, rasa sepenanggungan yang sama apalagi diketemukan dalam sebuah kegiatan ibadah *manaqib* yang akan semakin menguatkan “rasa” itu. Prinsip-prinsip kedua kelompok ini sangatlah kuat kecil kemungkinan untuk goyah. Maka tak jarang perbedaan paham dan pendapat mengenai *Kemursyidan* terjadi di kalangan ikhwan baik dari kelompok 37 maupun 38. Konflik sosial ini meskipun tidak separah antara sunni dan syiah akan tetapi dampaknya renggangnya tali silaturahmi antar ikhwan. Maka diperlukan seorang tokoh yang mampu menggerakkan ikhwan-ikhwan TQN baik dari kelompok 37 maupun 38 menjadi satu kesatuan asalkan seseorang itu berasal dari masing-masing kelompok dengan syarat tingkat keilmuan dan tingkat spiritualnya tinggi serta memiliki ikatan darah dari *Mursyid* sebelumnya.

2. Kekuasaan Kharismatik

Dalam interaksi sosial antar individu yang kemudian membentuk sebuah kelompok. Dalam kelompok ini yang dinamakan seorang pemimpin lahir didalamnya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Budiardjo (2007) menyebutkan bahwa kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku individu atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Max Weber dalam Anwar & Adang (2017: 230) mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

Anwar & Adang (2017: 230) menyebutkan bahwa sumber kekuasaan itu terdiri dari kekuasaan yang bersumber pada kedudukan dan kekuasaan yang bersumber pada kepribadian. Kekuasaan yang bersumber pada kedudukan diantaranya kekuasaan formal, kendali atas hukum, kendali atas informasi, kendali atas ekologi, kendali atas penempatan jabatan dan kendali atas tata lingkungan. Kemudian kekuasaan yang bersumber pada kepribadian, diantaranya: keahlian atau keterampilan, persahabatan atau kesetiaan, Kharisma, kekuasaan yang bersumber pada politik, koalisi, partisipasi, dan

institusionalisasi. Orang yang mempunyai kekuasaan tentu juga mempunyai kewenangan. Anwar & Adang (2017: 234) menyebutkan bahwa wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintahkan orang lain, tanpa ada wewenang terhadap suatu pekerjaan janglah mengerjakan pekerjaan itu karena tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukannya.

Max Weber dalam Anwar & Adang (2017: 234) menyebutkan bahwa tiga macam wewenang yang dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya:

- a. Wewenang Kharismatik, yakni sumber wewenang yang didasarkan pada Kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus ini melekat pada seseorang dan bersifat Given, dalam arti pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang disekitarnya mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan mitos (taklid), karena pada dasarnya mereka menganggap bahwa sumber dari kemampuan tersebut adalah sesuatu yang berada diatas kemampuan dan kekuasaan manusia pada umumnya;
- b. Wewenang Tradisional, yakni wewenang yang dimiliki oleh orang-orang yang anggota kelompok tertentu yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan didalam suatu masyarakat. Biasanya wewenang ini diturunkan secara turun temurun kepada anak cucu orang atau berdasarkan *Dzurayah* tersebut seperti kepemimpinan masyarakat adat, kepala suku, raja, dll.

- c. Wewenang Rasional (legal), yakni wewenang yang didasarkan pada system hukum yang berlaku dimasyarakat. System hukum disini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh aparat negara. Di era modern ini atau era demokrasi seseorang yang mempunyai kewenangan dalam memimpin didasarkan atas pemilihan dengan suara terbanyaklah yang menjadi pemimpin.

Max Weber memandang bahwa wewenang Kharismatik biasanya muncul pada sekte-sekte keagamaan khususnya waktu itu terjadi pada para pemimpin umat gereja Khatolik. Penampilan seseorang dianggap kharismatik dapat diketahui dari ciri-ciri fisiknya, misalnya matanya yang bercahaya, suaranya yang kuat, dagunya yang menonjol atau tanda-tanda lain. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa seseorang memiliki jiwa sebagai pemimpin kharismatik, seperti kepemimpinan para nabi dan sahabatnya. Menurut Max Weber jenis ini lebih banyak bersifat informal karena tidak perlu diangkat secara formal, tidak ditentukan oleh harta, usia, bentuk fisik, pandai atau bodoh dan sebagainya. Meskipun demikian, tidak jarang pemimpin karismatik ini jadi pengkultusan oleh pengikutnya, yang hebat ialah pujian dan pemujaan yang berlebihan dari anak buah pada pimpinannya dan itu banyak terjadi di Indonesia khususnya pada kelompok-kelompok Islam Tradisional yang dianggap melakukan pemujaan berlebihan terhadap seorang tokoh yang mempunyai kekuatan *Illahi* yang ada didalam dirinya.

Kemudian Koentjaraningrat (1972: 181) mencoba menganalisis bahwa terdapat empat komponen kekuasaan dalam kepemimpinan, yakni kewibawaan, wewenang, kharisma dan kekuasaan dalam arti khusus dalam setiap masyarakat dan juga pada setiap masa (tradisional dan masa kini). Namun yang membedakan adalah porsi masing-masing komponen dalam mempengaruhi keterpilihan seorang pemimpin. Dalam kekuasaan pemimpin tradisional (terutama di Indonesia), wewenang (*legitimacy*) tidak hanya cukup bila didasarkan pada kewibawaan seseorang yang hanya disandarkan kepada kepandaian dan keahlian dalam bidang tertentu namun wewenang juga perlu dikuatkan dengan adanya garis keturunan (dalam kerajaan), yang secara jauh garis ini dapat ditarik jauh hingga ke garis “keturunan dewa” sehingga wewenang ini bisa bersifat keramat (kharisma).

Ciri khas konsepsi kekuasaan yang melekat pada pemimpin di masa ini adalah *pertama*, berasal dari kharisma (berasal dari wahyu Tuhan atau dari dewa), *kedua*, memiliki wewenang (memiliki kekuatan sakti, mempunyai keturunan yang sah, mampu melakukan upacara, dan memiliki pusaka-pusaka keramat). Porsi terbesar kepemimpinan di masa tradisional diberikan pada komponen ini. *Ketiga*, memiliki kewibawaan, yakni memiliki sifat yang sesuai dengan cita-cita masyarakat dan terakhir, kekuasaan dalam arti khusus.

Seorang ulama di Indonesia tergolong yang memiliki kekuasaan Kharismatik. Ke-kharismaannya dipilih bukan hanya melalui musyawarah sebagaimana tokoh atau pemimpin dimasyarakat pada umumnya akan tetapi

dirinya memiliki aura Propheties atau kenabian yang umumnya dimiliki oleh seorang Nabi akan tetapi sampai pada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rosul sudah ditutup dan tidak ada lagi setelahnya yang ada para ulama, *Syekh*, wali dan *Mursyid* yang menjadi penerus Risalah kenabian. *Mursyid* dalam ajaran *Thoriqoh* memiliki banyak pengikut dibandingkan dengan tokoh ulama yang lain karena memiliki kekuatan ilahiah atau disebut juga Karomah. Kekuasaan seorang *Mursyid* didapat dari guru *Mursyid* sebelumnya atau disebut juga dengan *Silsilah* atau mata rantai didalam organisasi *Thoriqoh* dan tentu dengan melalui pelatihan dan ujian dari gurunya tersebut. Yang kemudian adanya mimpi atau scara spiritual disebut juga dengan wahyu yang menguatkan seorang *Mursyid* mendapatkan kekuasaan kharismatik hingga secara tak langsung masyarakat atau pengikut yang memandangnya akan muncul aura seorang pemimpin.

3. Teori Elit Sosial

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang memiliki kepentingan untuk bertahan hidup. Dari sekumpulan masyarakat ini untuk menjamin adanya keberlangsungan hak-hak hidup tiap individunya maka ada segelintir orang yang mampu menggerakkan individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Segelintir orang ini nantinya akan disebut elit, dari kumpulan elit ini akan ada satu yang menjadi pamor ketokohnya maka akan dijadikan pemimpin dari para elit dan para elit akan mempengaruhi gerak hidupnya masyarakat. Echols dan Shadily dalam rafikasari (2017:53) mendefinisakan bahwa elit bermakna

sebagai sebutan kepada golongan-golongan terpilih, kaum atasan, golongan atas. Dwipayana dan Ratnawati dalam Rafikasari (2017:53) menyebutkan bahwa elit adalah kelas tersendiri yang terdiri dari mereka yang telah berhasil menggapai kedudukan dominasi di dalam masyarakat, dalam arti nilai-nilai yang mereka bentuk (ciptakan) mendapatkan penilaian tinggi di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai yang dimaksud berupa kekayaan, kehormatan, pengetahuan, dan lain-lain.

Anshority dalam Bahar (2001: 28) menyebutkan bahwa dalam penegertian secara sosiologis dan politis, elite adalah *Rulling Class*, artinya suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam strata suatu sosial. Ketika sudah mencapai pada kedudukan kekuasaan elite ini dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik Laswell dalam Rafikasari (2017:52) kemudian menegaskan pula bahwa dengan keunggulan yang melekat pada elit, maka elit dengan mudah terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan-keputusan. Kemudian Bahar (2001: 28) menambahkan bahwa elite dibagi menjadi dua yakni elit politik dan elit non-politik. Elite politik merupakan segelintir orang-orang yang menduduki jabatan politik atau kekuasaan politik yang di pilih melalui proses politik tertentu, misalnya Gubernur, Walikota, anggota Dewan (DPR & DPRD), dan pemimpin-pemimpin partai politik. Sedangkan elit non-politik adalah segelintir orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam masyarakat, misalnya elit

keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, elit kepemudaan, elit profesi dan lain-lain.

a. Teori Elit Charles Wright Mills

1) Biografi Charles Wright Mills

Mills atau Charles Wright Mills lahir pada tanggal 28 Agustus 1916 (Ritzer dalam Rochadi 2004: 5), ayahnya seorang broker asuransi dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Mills dikenal cerdas dan pada tahun 1939 pada umur 23 tahun berhasil mendapatkan gelar master di Universitas Texas. Kemudian di tahun 1939 itu juga Mills masuk Universitas Wisconsin dan sukses mendapatkan gelar Ph.D tahun 1941 dengan dibimbing oleh dua teoritis klasik, yaitu Hans Gert dan Howard Becker. Mills menghabiskan sebagian besar karirnya di Universitas Columbia (1941-1962). Mills meninggal tahun 1962 dengan pemakaman yang hanya dihadiri beberapa orang. Kehidupan pribadi Mills kurang tenang. Rumah tangganya diliputi ketegangan, antara lain tiga kali menikah dengan masing-masing istri membuahkan satu orang keturunan (Ritzer dalam Rochadi, 2004: 5). Kegelisahan rumah tangganya ini juga mengimbas kehidupan akademiknya. Mills suka menyendiri (*lone wolf*) dan kurang diterima koleganya karena sebagian penganut teori-teori Durkheim dan Parsons. Bahkan Mills mengkritik gurunya sendiri (Gert dan Becker) karena karya-karyanya hanya menghasilkan pemikiran-pemikiran abstrak dan metode-metodenya

hanya latihan menemukan angka (Wallace dan Wolf dalam Rochadi, 2004:5). Karya Mills berada pada posisi yang berbeda dari arus utama ilmu dan teori sosial pada jamannya, seperti teori fungsionalisme struktural, teori pertukaran sosial dan teori fenomenologi. Selain itu Mills dikenal sebagai penganut teori kritis yang gemar mengutip Marx dan Hegel. Keterasingannya bertambah ketika Mills menerima Bintang kehormatan dari Uni Soviet.

Menurut latar belakang pribadi dan sosial, Mills adalah orang yang terasing di rumah, di kampus dan di masyarakat yang kemudian mempengaruhi isi teori-teorinya dan lingkungan itu semua menjadi sasaran kritik terhadap teorinya. Mills menolak melestarikan pemikiran dari guru-gurunya, seperti teori penyimpangan sosial dari Becker dan metodologi komunikasi dari Palu Lazarfield, karena menghasilkan “intelektual tukang yang mengabdikan tanggung jawab sosialnya sebagai pelayan kekuasaan yang bersembunyi di balik kedok analisis “bebas nilai” (Waters, 1994 dalam Rochadi, 2004: 6).

2) Teori Power Elite C. Wright Mills

Rochadi (2004: 8) menyebutkan bahwa *Power elite theory* atau Teori elit kekuasaan mengkaji realitas obyektif dan realitas subyektif. realitas obyektif terlebih dahulu dilakukan yaitu dengan menemukan aktor dan struktur. Setelah diketahui, Mills bergerak lebih dalam dengan mencari hubungan antara aktor dan struktur. Aktor-aktornya adalah elit militer, elit ekonomi dan elit politik. Struktur yang muncul dan menopang

eksistensi aktor tersebut adalah militer sebagai lembaga, partai-partai politik dan perusahaan-perusahaan. Kemudian Mills mencari hubungan dari ketiga kelompok elit tersebut untuk menjelaskan mengapa tiga struktur yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan aktor-aktornya membentuk struktur kekuasaan yang kurang lebih terintegrasi. Mills mengarahkan pencariannya kepada realitas obyektif mikro, yaitu organisasi atau perkumpulan yang pernah mereka masuki ketika masih di sekolah menengah atau perguruan tinggi. Dari sini Mills bergerak ke lebih Mikro lagi yaitu pengalaman-pengalaman individual dan kolektif masa lalu dan menemukan adanya ikatan psikologis antar mereka yang ketika Mills melakukan penelitian menduduki posisi sebagai elit. Ikatan psikologis dan kesan-kesan atau pengalaman individual jelas merupakan realitas subyektif. Di sinilah Mills menghubungkan realitas obyektif dan subyektif. Mills yakin adanya hubungan antar kedua jenis realitas itu, dan gejala pada satu jenis realitas harus dicari pada realitas lainnya.

Teori *Power Elite* yang di gagas Mills dalam Mawardi (2019: 76) berawal dari adanya kelompok tertentu dari masyarakat atau negara yang bisa mempengaruhi jalannya struktur sosial dan politik. Di dalam suatu negara ada suatu kelompok elitis atau disebut dengan "elit kuasa" yang berada dibalik skenario jalannya kebijakan pemerintah. Elite kuasa memiliki anggota yang posisinya menjadikan mereka menjadi lebih penting dari masyarakat (*grass root society*). Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki posisi untuk memutuskan segala persoalan yang

memiliki konsekuensi besar. *Power elite* ini semestinya tidak harus pemegang kekuasaan formal, seperti pejabat pemerintahan, melainkan sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar untuk mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Setidaknya ada empat kelompok besar elite yang berhasil diidentifikasi diantaranya:

- a) *pertama* adalah elit politik (*elite of goal attainment*);
- b) *kedua*, elit ekonomi, militer, diplomat, dan cendekiawan (*elite of adaptation*);
- c) *ketiga*, elite yang menggunakan otoritas moral seperti rohaniawan, filosof, guru dan tokoh masyarakat (*elite of integration*); dan
- d) *keempat* adalah elite yang menjaga kesatuan masyarakat secara emosional dan psikologis, seperti para selebriti yang menjadi artis, penulis, aktor/tres terkenal, olahragawan terkenal dan lainnya (*pattern-maintenance elite*).

kemudian Mills dalam Mawardi (2019: 79) menjelaskan bahwa ada tiga level kekuasaan, diantaranya Level tertinggi ditempati oleh *power elite* yang bekerja secara informal dan dari balik layar yang memiliki tugas membuat keputusan-keputusan besar. Level kedua *middle class*, beranggotakan anggota legislatif, kelompok-kelompok kepentingan tertentu, dan para pemimpin ditingkat lokal. Pada level ini pengambilan keputusan dilakukan dengan cara *lobby* (prosedur legislatif) dan tingkat keputusannya pun masih dibawah level pertama. Selanjutnya yang terakhir level ketiga adalah masyarakat yang tidak

teroganisir yang pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka sendiri sangat sedikit, dan bahkan kadang tidak menyadari adanya keputusan tersebut. Jadi dalam teori elit membahas tentang kelompok-kelompok tersendiri dan terpisah yang memiliki pengaruh terhadap jalannya sistem, baik itu sistem politik maupun sosial yang dapat berpengaruh terhadap masyarakat atau anggota-anggota yang lebih besar.

Di dalam islam yang dinamakan elit ini merupakan seseorang yang keilmuan diatas rata-rata orang muslim kebanyakan, misal para ustad, kyai, ajengan, *Syekh*, atau sebutan lainnya yang menandakan seseorang itu berbeda dari yang lain. Dalam *Thoriqoh* elit-elit yang dimaksud adalah tokoh yang berpengaruh atas para Ikhwan-ikhwan, yang bisa mempengaruhi ruang gerak ikhwan baik dari segala aspek, sebutan khusus elit-elit ini yakni wakil talqin yang bertugas menyampaikan Bai'at atas tugas dari *Syekh Mursyid*. Selain wakil talqin adapula tokoh yang ditokohkan oleh ikhwan-ikhwan di suatu tempat karena keilmuan *Tassawuf* atau berthoriqohnya cukup lama yang menjadikan tempat diskusi dan pengaduan para ikhwan mengenai kehidupannya. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana elit mempengaruhi para ikhwan-ikhwan TQN dalam menanggapi situasi konflik sosial antara kelompok 37 dan 38 di Kecamatan Dayeuhluhur.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperdalam isi dan konsep penelitian maka penyusun memerlukan pembandingan dengan penelitian-penelitian sebelum-sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan yang memperjelas penelitian dan terhindari dari Plagiarisme. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai penelusuran diantaranya;

1. Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser (Khusniati Rofiah IAIN Ponorogo, Jawa Timur).

Penelitian ini menjelaskan Refleksi dari teori konflik yang di kemukakan oleh Lewis A. Coser adalah dengan gambaran konflik yang terjadi pada organisasi keagamaan terbesar di Indonesia antara lain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah. Keduanya mempunyai ideologi organisasi dan tata cara peribahadan yang berbeda sehingga tak jarang dua organisasi ini mengalami konflik baik secara sosial maupun di ranah politik. Dari konflik inilah maka terjadilah transformasi menjadi relasi antar kelompok yang harmonis, misalnya banyak anak-anak dari NU belajar di Lembaga Pendidikan Muhamadiyah begitu pula sebaliknya dengan anak-anak dari Muhamadiyah yang belajar di pesantren-pesantren yang di Kelola oleh NU. Dari kasus ini konflik yang di tulis oleh Rofiah masuk ke dalam konflik non-realistik yang didalamnya ada konflik ideologi. Kemudian Coser mengungkapkan bahwa setiap konflik pasti ada hal yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial dengan adanya perubahan sosial ke arah yang lebih baik misalnya persatuan internal dan kokohnya kepercayaan antar anggota di kelompoknya. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, diantaranya:

- a. Persamaan dari penelitian yang dilakukan Rofiah ini adalah konflik didalam Islam dengan dua organisasi yang berpandangan berbeda baik dalam tataca

peribadatan, amaliyahnya ataupun keilmuan lainnya yang mempengaruhi kehidupan sosial bagi umatnya. Pola konflik memiliki kesamaan yakni tidak sampai pada kekerasan fisik hanya Sebatas pada tataran perdebatan saja menurut penelitian ini. Begitu teori yang di gunakannya adalah dengan teori konflik Lewis A. Coser yang mengatakan bahwa konflik itu bukan hanya pada hal-hal yang negative melainkan membawa kebermanfaatn bagi kelangsungan hidup sosial manusia. Dan juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kasus yang ditelitinya.

- b. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Rofiah adalah Teknik penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan studi naratif untuk menggambarkan dan menganalisis kasus dengan teori sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penyusun menganalisis fenomena menjadi kasus untuk diteliti. Dan juga latar tempat dan yang diteliti oleh penyusun di satu majelis atau organisasi keagamaan islam namun pecah menjadi dua semenjak ada suatu peristiwa tertentu.
2. Konflik Sunni-Syiah dan dampaknya terhadap komunikasi intra religius pada komunitas di Sampang-Madura, Rachmah Ida1 & Laurentius Dyson (FISIP UNAIR & Centre for Muslim State & Society, UWA, Australia)

Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Desa Karang Gayam kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Jawa Timur, merupakan konflik antara Sunni dan Syiah. Konflik Sunni-Syiah di Sampang menurut tulisan ini berawal dari konflik keluarga yang menjadi tokoh agama islam di sana yang kemudian meluas menjadi konflik komunal. Penyebaran Syiah di Sampang mengalami perkembangan yang pesat hingga mendapatkan reaksi dari oleh elit atau tokoh Kyai lokal hingga terjadi saling serang yang berdampak pada terusirnya Syiah dari Desanya. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, diantaranya:

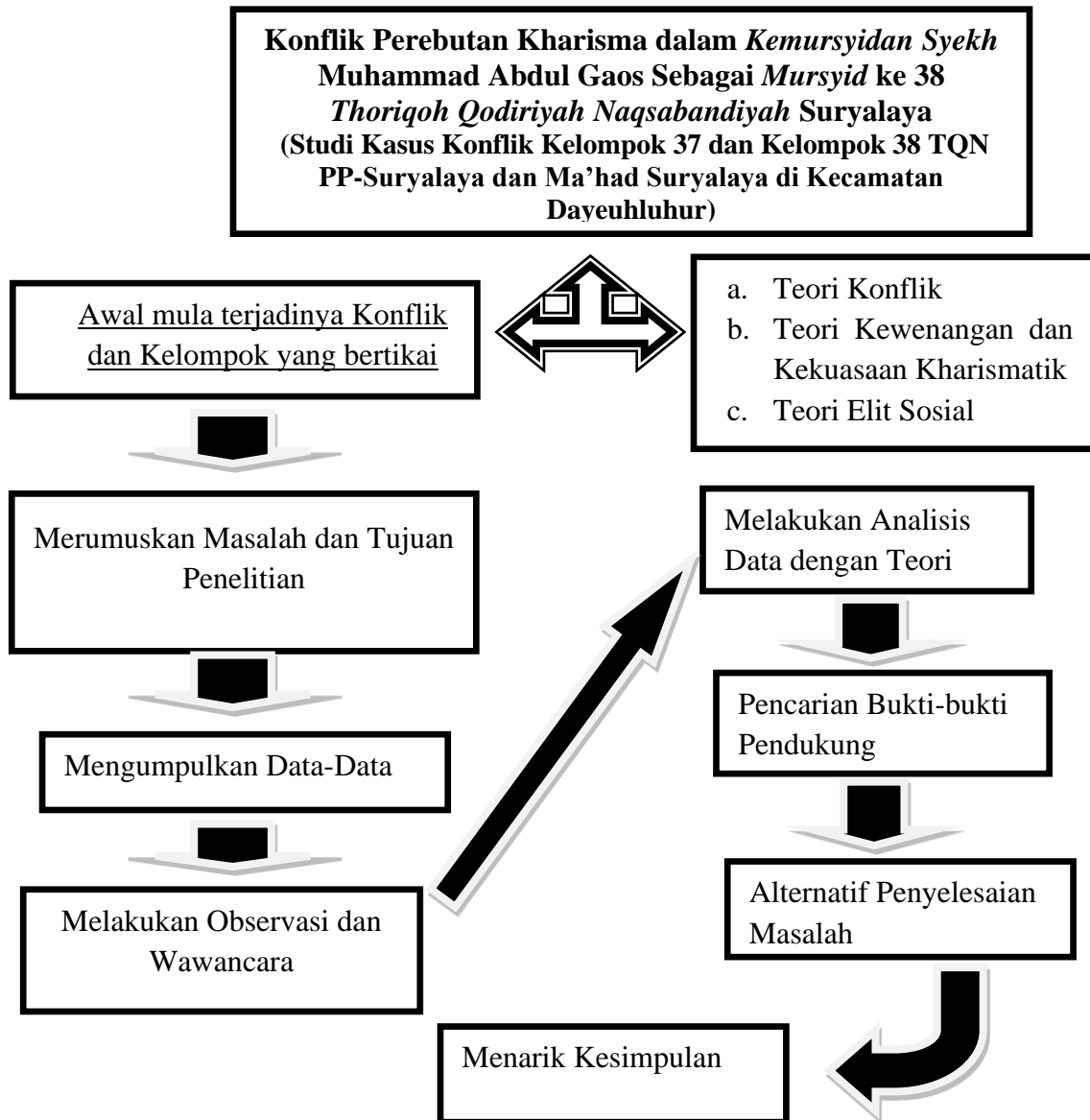
- a. Persamaan dari penelitian ini adalah pola konflik yang berawal dari keluarga tokoh agama yang kemudian meluas pada masyarakat yang tidak mengetahui letak permasalahannya dimana dan penyebabnya, karena cenderung masyarakat yang mengikuti alur “katanya”.
 - b. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Ida & Dyson adalah pendekatan penelitian yang dilakukannya adalah menggunakan pendekatan sosio-kultural historis dan komunikasi antar budaya sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan studi kasus. Serta komunitas yang diteliti berbeda yang satu dalam satu agama beda kelompok dan satunya yang diteliti oleh penyusun dalam tataran satu agama dan satu komunitas yang terpecah.
3. Konflik dan Integrasi: Analisis terhadap pemahaman keagamaan kelompok Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU) (Studi Kasus masyarakat Kelurahan Mekarsari, Depok, Jawa Barat) oleh Muhammad Ayub.

Penelitian ini menjelaskan tentang konflik antara sesama umat muslim yang berbeda pandangan dan keyakinan akan pegangan atau sumber pedoman dalam menjalankan peribadatan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan intepretasi teks kitab suci sehingga melahirkan perbedaan pendapat dan dalam konsep ritual keagamaan. Misalnya dalam ritual keagamaan atau peribadatan NU adanya Tahlilan (mendoakan orang yang sudah meninggal), adanya acara memperingati maulid Nabi, Tawassulan (mengirimkan al-fatihah bagi orang yang sudah meninggal), adanya pembacaan do'a Qunut dalam sholat subuh dan lain-lain. Dari serangkaian ritual keagamaan yang di lakukan oleh masyarakat penganut aliran NU bersebrangan dengan penganut Persis yang dianggapnya sebagai bid'ah (tidak ada tuntunan dari Rosul). Konflik ini berdampak pada kegiatan-kegiatan ibadah warga Persis yang mana melarang kelompoknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Masjid Jami Daarul Mu'minin dengan melarang kepengurusan DKM oleh orang-orang Persis. Namun konflik ini

mereda setelah adanya upaya-upaya penyelesaian masalah antara kedua belah pihak seperti adanya mediasi, mengedepankan toleransi yang di bombing oleh tokoh yang berpengaruh, bakti sosial, gotong royong dan lain-lain. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, diantaranya:

- a. Persamaan dari penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Ayub dengan Penelitian yang di lakukan penyusun adalah adanya konflik yang melibatkan dua kelompok yang satu agama beda pandangan yang artinya dalam tataran satu komunitas agama Islam. Kemudian metodologi penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan menelusuri suatu kasus (studi kasus) serta adanya wawancara dari kedua belah pihak untuk mendapatkan data yang valid.
- b. Perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Ayub dengan Penelitian yang di lakukan penyusun adalah lebih kepada pencarian letak akar permasalahannya di mana dengan mengedepankan mencari pengungkapan alasan tiap-tiap narasumber atau informan antara dua kelompok yang berbeda pandangan sedangkan penelitian yang di lakukan Muhammad ayub lebih mengedepankan perbedaan pandangan persoalan tata cara peribadatan atau ritual keagamaan yang di perdebatkan antara dua kelompok yang memiliki landasan atau intepretasi terhadap kitab yang melahirkan perdebatan dan konflik.

C. Kerangka Penelitian



Penjelasan

1. Diawali dengan judul penelitian untuk menjadi landasan utama dalam melakukan penelitian.
2. Awal mula terjadinya Konflik dan kelompok yang bertikai akan di bahas pada Bab I (Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah,

Tujuan Penelitian, dan kegunaan penelitian) yang menguraikan bagaimana masalah ini muncul, timbulnya perpecahan internal sehingga membentuk dua kelompok yang memunculkan perselisihan.

3. Setelah di lakukannya penguraian masalah atau latar belakang masalahnya apa, maka akan di bentuk rumusan masalah yang isinya berupa pertanyaan dalam penelitian, penyusun merumuskan masalah dengan menanyakan sumber kekuasaan Abah Aos, Alasan terjadi perbedaan pandangan dalam *Kemursyidan* TQN PP-Suryalaya dan Ma'had Suryalaya-Sirnarasa, akar penyebab konflik, dan jalannya konflik seperti apa;
4. Teori yang di gunakan dalam penelitian yang terdapat pada BAB II tentang Tinjauan Pustaka (Landasan Teori, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Penelitian) yakni Teori Konflik, Kewenangan dan kekuasaan Kharismatik dan Teori Elit.
5. Kemudian setelah merumuskan masalah, maka penyusun mulai mengumpulkan data-data baik dari buku-buku maupun jurnal dalam bentuk fisik maupun non-fisik (internet) yang akan dijadikan referensi penelitian serta mencari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.
6. Masuk pada proses BAB III tentang Metode Penelitian (Jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Sasaran Penelitian, Teknik Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penentuan Informan, Teknik Analisis Data, dan Validitas Data) setelah mengumpulkan data-data yang dijadikan sebagai referensi maka penyusun mulai melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan informan-informan yang telah ditentukan baik dari kelompok 37 maupun dari kelompok 38 yang menggunakan Teknik *Snow Ball Sampling* dan *Purposive sampling* (dari orang biasa ke tokoh berpengaruh)
7. Setelah data-data semuanya terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan teori yang sudah ditentukan oleh penyusun untuk membuktikan korelasi antara teori dan apa yang terjadi di lapangan.
8. Kemudian setelah melakukan analisis data, penyusun mencari-mencari data-data bukti pendukung baik fisik maupun non-fisik. Bisa berupa foto, rekaman

wawancara dengan informan, ataupun sumber lainnya yang kuat untuk suatu pembuktian. Data-data ini nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan validitas data.

9. setelah semua data-data pendukung sudah ada, langkah berikutnya membuat alternatif penyelesaian masalah yang memuat rincian bagaimana menyelesaikan permasalahan penelitian berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk menguatkan argumen penyusun.
10. Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan yang memuat jawaban akhir dari penelitian konflik sosial-politik yang terjadi antara kelompok 37 dan 38 di Kecamatan Dayeuluhur alasannya kenapa dan tingkat konfliknya bagaimana, pengaruhnya terhadap masyarakat khususnya umat muslim apa, dan alternatif penyelesaian masalahnya bagaimana.